



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 03 April 2017

Halaman: 2

BABAK BARU PERKARA PILWALI YOGYA

KPU Masih Tunggu Informasi Resmi MK

YOGYA (KR) - Sengketa perkara Pilwali Yogya dengan agenda putusan dismissal hingga kemarin belum dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai tahapan, agenda tersebut harus digelar paling lambat pada 5 April 2017. KPU Kota Yogya selaku termohon pun masih menantikan informasi resmi dari MK.

Dari 50 sengketa pilkada yang diajukan ke MK, baru 43 daerah yang sudah dijadwalkan agenda sidang putusan dismissal. Sedangkan tujuh daerah lainnya, termasuk Kota Yogya belum termuat dalam laman resmi MK. "Belum ada pemberitahuan ke kami, termasuk saat mengecek ke website MK juga belum keluar. Jadi kami masih menunggu saja," tandas Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, Minggu (2/4).

Sidang putusan dismissal tersebut sangat dinantikan pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait. Pasalnya, hasil putusan dismissal akan menjadi babak baru dalam perkara Pilwali Yogya. Jika majelis hakim konstitusi memutuskan untuk dilanjutkan

dalam pembuktian, maka akan dilakukan sidang secara maraton hingga 2 Mei 2017. Sebaliknya, jika diputus tidak memenuhi syarat untuk diperkarakan, maka sidang akan dihentikan.

Dalam sidang dengan agenda jawaban termohon yang digelar pada 22 Maret 2017 lalu, KPU Kota Yogya membantah semua dalil pemohon yang diajukan oleh tim Imam-Fadli. Bantahan itu juga melampirkan dokumen tentang hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan kota, berita acara proses rekapitulasi suara, hingga dokumen terkait daftar pemilih.

"Apapun hasil dari rapat permusyawaratan hakim, kami tetap akan mengikuti. Termasuk jika dilanjutkan, maka alat bukti juga akan kami perku-

at," tandasnya.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogya, Antonius Fokki Ardiyanto, mengaku pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP jika sengketa Pilwali Yogya lolos untuk dilanjutkan. Bahkan, tim internalnya kini tengah menyiapkan semua alat bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian. "Ahli hukum tata negara serta administrasi publik juga turut kami siapkan untuk tahapan sidang pembuktian ke depan," akunya.

Menurut Fokki, selain Kota Yogya terdapat enam daerah lain yang bakal melanjutkan ke sidang pembuktian. Masing-masing ialah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Bombana, Kota Salatiga, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Takalar. Semua yang dinyatakan lolos saringan pertama tersebut, imbuh Fokki, memang belum masuk dalam jadwal sidang di laman MK. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005